

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, etnis dan budayanya. Konsep konsep kemanusiaan yang ada dalam berbagai sistem budaya tentu memiliki titik titik kesamaan antara satu dengan lainnya. Jika hal ini dapat dibuktikan, maka kesimpulan logisnya ialah bahwa manusia dan kemanusiaan dapat dipandang tidak lebih dari pada kelanjutan logis penjabaran ide ide dasar yang ada dalam setiap budaya tersebut dalam konteks kehidupan kontemporer yang kompleks dan global.¹

Membicarakan antara konsep manusia dan kemanusiaan tidak akan terlepas dari hukum. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antara manusia, membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan, dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Membicarakan hukum tidak dapat hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal tetap juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita cita keadilan masyarakatnya.²

¹ A. Masyhur Effendi, Taufani S. Evandri, 2010, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik* edisi ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 135

² Satjipto Rahardjo 1996, *Ilmu Hukum* edisi IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 159

Hukum diciptakan dan ditujukan untuk perilaku manusia agar tidak terjadi gesekan-gesekan kepentingan. Esensi dari hukum itu sendiri adalah sekumpulan peraturan untuk mengatur perilaku manusia bersifat mengatur dan memaksa serta memiliki sanksi ketika dilanggar. Salah satu cabang ilmu hukum yang digunakan masyarakat adalah cabang hukum pidana.

Pada pelaksanaannya terkadang hukum tidak berjalan semestinya, hal ini berkaitan dengan unsur substansi, struktur dan kultur yang merupakan unsure-unsur system hukum. Kurangnya kultur atau kesadaran masyarakat akan hukum dan juga permasalahan struktur atau penegakan substansi hukum itu sendiri dapat menyebabkan beberapa permasalahan hukum yang menimbulkan kejahatan. Seseorang yang dinyatakan terbukti bersalah melalui putusan pengadilan dan harus menjalani hukuman pidana inilah yang dinamakan narapidana.

Seorang narapidana harus menjalani hukuman dan hilang kemerdekaan dilembaga pemasyarakatan. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Dari pengertian tersebut, maka dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem kepenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dijelaskan sebagai berikut: Pasal (1) “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Pasal (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.³

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) Atau terhukum. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

“Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman”.⁴

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁴ Dr. Mudzakir. 2012. *Perencanaan Pemangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Hal. 5.

Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara⁵

Pada pelaksanaannya, ketika menjalani hukuman tersebut seorang narapidana harus mentaati beberapa peraturan yang ditetapkan oleh lembaga permasyarakatan yang menjadi tempat menjalani hukuman. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Seorang narapidana meskipun telah dijatuhi vonis hukuman, namun tetap memiliki hak sebagaimana kodratnya sebagai manusia. Terkait beberapa hak narapidana atau yang menjadi warga binaan lembaga permasyarakatan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Salah satu hak yang diatur dalam aturan tersebut berkaitan dengan izin keluar dalam hal hal luar biasa dari lembaga permasyarakatan, yang mana ketika seorang narapidana tersebut memiliki beberapa keadaan mendesak, misalnya terdapat keluarga yang meninggal, membagi warisan, menjadi wali nikah dan lain-lain dalam hal yang sangat mendesak dan penting. Hal tersebut diatur dalam izin keluar lapas dalam hal hal luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 huruf (b). Namun secara pelaksanaan, terdapat narapidana yang keluar masuk secara bebas

⁵ Psychology 2012 *pengertian narapidana* <http://www.psychologymania.com> tanggal 02 april 2018 diakses pukul 13.00 WIB

dengan kedekatan dengan petugas maka dengan bebas narapidana tersebut bisa keluar masuk lapas tanpa prosedur yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Madiun maka dari itu narapidana tersebut telah menyalahi dan menyalahgunakan aturan tersebut. Sehingga hal ini menarik untuk dilakukan penelitian penerapan dari peraturan tersebut serta apa kendala bagi lembaga pemasyarakatan dalam memberikan izin keluar lapas dalam hal luar biasa pelanggaran tentang izin keluar dalam hal hal luar biasa lembaga permasyarakatan.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian bagaimana penerapan pasal 52 ayat 1 huruf (b) menurut Peraturan Pemerintah no 32 Tahun 1999 dan apa kendala bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Madiun dalam memberikan izin keluar masuk lapas dalam hal hal luar biasa DiLembaga Pemasyarakatan Kota Madiun didalam penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI IZIN KELUAR LAPAS DALAM HAL HAL LUAR BIASA MENURUT PASAL 52 AYAT (1) HURUF (b) PERATURAN PEMERINTAH NO 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN”**.

B. RumusanMasalah

Berdasarkan penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penerapan pasal 52 ayat 1 huruf (b) menurut Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Madiun?

2. Apa kendala bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Madiun dalam memberikan izin keluar masuk lapas dalam hal hal luar biasa menurut Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan pasal 52 ayat 1 huruf (b) menurut Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 DiLembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Madiun.
2. Untuk mengetahui kendala bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Madiun dalam memberikan izin keluar masuk lapas dalam hal hal luar biasa dilihat dari Peraturan Pemerintah pasal 52 ayat 1 huruf (b) diLembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Madiun

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat berdasarkan penelitian ini antara lain :

1. Bagi Peneliti

1. Memberikan wawasan bagi penulis dalam mengetahui penerapan pasal 52 ayat 1 huruf (b) terkait izin keluar lapas dalam hal luar biasa.
2. Menambah wawasan bagi penulis untuk mengetahui kendala bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Madiun dalam memberikan izin keluar lapas dalam luar biasa berdasarkan pasal 52 ayat 1 huruf (b) terkait izin keluar lapas dalam hal luar biasa

2. Bagi Pembaca

1. Menambah pengetahuan tentang peraturan pemerintah no 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan yang diberlakukan didalam lapas klas I kota Madiun.
2. Dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam melakukan penelitian terkait penerapan Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan .
3. Sebagai motivasi kepada pembaca agar dapat mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya terkait izin keluar lapas dalam hal luar biasa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan

3. Bagi Petugas Sipir

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam menerapkan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan terkait izin keluar lapas dalam hal hal luar biasa dan dapat dipergunakan sebagai mestinya tanpa ada penyalahgunaan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini salah satunya adalah untuk memberikan sebuah gambaran dari penerapan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adanya suatu permasalahan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Madiun, karena menurut penelitian permulaan terdapat sebuah permasalahan dimana adanya seorang narapidana yang bebas keluar masuk lapas tanpa memerlukan izin khusus yang dimana hal ini menyalahi Pasal 52 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terkait izin keluar lapas dalam hal hal luar biasa.

Penelitian ini memiliki kegunaan bagi penulis yakni menambah wawasan terkait penerapan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 dan kendala apa saja bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Madiun dalam memberikan izin keluar masuk lapas dalam hal hal luar biasa Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terkait izin keluar lapas dalam hal hal luar biasa. dan hasil dari penelitian ini agar dapat menjadi acuan bagi petugas Sipir terkait memberikan izin keluar lapas dalam hal hal luar biasa dan agar dapat digunakan sebagai mestinya.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang dapat menjadi sarana ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis

sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action* dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas⁶. Dengan pendekatan ini bagaimana penerapan pasal 52 ayat 1 huruf b menurut Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Izin Keluar Lapas Dalam Hal Luar Biasa dan juga kendala bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Madiun dalam memberikan Izin Keluar Lapas Dalam Hal Luar Biasa, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada di lapangan ataukah tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

2. Pemilihan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Madiun dikarenakan, data awal yang diperoleh penulis adanya seorang mantan narapidana yang pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun yakni dengan nama samaran MH bahwa ketika dalam masa menjalani hukuman pidana di lapas tersebut dapat keluar masuk tahanan dengan bebas atas dasar kedekatan dengan para petugas bukan karena terjadi hal hal yang luar biasa yang dimana hal tersebut menyalahi pasal 52 ayat 1

⁶ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. Perihal Penelitian Hukum. Alumni. Bandung, 1979, hlm. 65.

huruf (b) peraturan pemerintah no 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan terkait izin keluar lapas dalam hal hal luar biasa.

Sehingga berdasarkan data awal tersebut tersebut penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Madiun yang bertempat di Jalan Yos Sudarso 100 Kota Madiun.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari sumber data primer dan sekunder

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang merupakan sumber utama dari bahan penelitian ini. Data primer penelitian ini di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni hasil diperoleh secara langsung dari wawancara dengan Urip Herunadi .SH selaku Kepala pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun terkait penerapan Izin Keluar Lapas Dalam Hal Luar Biasa dan kendala bagi lembaga pemasyarakatan dalam memberikan Izin Keluar Lapas Dalam Hal Luar Biasa

Kemudian data primer yang kedua yakni bersumber dari hasil wawancara dengan MH selaku mantan narapidana yang pernah menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Madiun dan mendapatkan Izin Keluar lapas Dalam Hal Luar Biasa

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. bahan hukum sekunder ini dapat berupa karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman *website* hasil penelitian maupun buku buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai Izin Keluar Lapas Dalam Hal Luar Biasa.

4. Teknik Pengumpulan Data dan/ atau informasi

Pengumpulan data yang digunakan dan sekaligus menjadi sumber bahan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara⁷.

wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. dengan demikian wawancara merupakan sebuah interaksi antar dua pihak. wawancara digunakan untuk pengumpulan data dan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti

Sehingga berdasarkan pendapat tersebut, wawancara adalah sebuah interaksi antar dua pihak yang terdapat pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. dan dalam memperoleh data secara langsung bertemu dengan memberikan pertanyaan kepada interviewee. interviewee dalam penelitian ini adalah Urip Herunadi SH selaku kepala pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Madiun

⁷ Moleong, L.J., 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan ke 26. penerbit: PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

dan Mbah MH selaku mantan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Madiun.

5. Teknik Analisa Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara setiap data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian diseleksi untuk disusun secara teratur agar dapat dianalisis sehingga menghasilkan data deskriptif sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengkaji data dalam merumuskan pembaharuan hukum dimasa yang akan datang. Surakhmad Winarno mengemukakan:

“ Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga pelakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Dimana pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tertib dalam penulisan laporan ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menunturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti”⁸

sehingga berdasarkan pendapat tersebut, analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan analisa yang didapat dari penelitian lapangan yang dimana dalam hal ini terkait izin keluar lapas dalam hal luar biasa menurut Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁸ Winarno, Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Tarsito, Bandung, 1997, hal.17

G. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menyusun dalam empat bab yang didalamnya terdiri atas sub bab agar mempermudah memahami penulisan hukum. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yakni latar belakang yang menjabarkan alasan permasalahan yang diangkat, rumusan masalah berisi permasalahan yang diangkat, tujuan penulisan yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan dan manfaat yang menjelaskan bagaimana penerapan dan apa akibat hukum dari pelanggaran terhadap izin keluar lapas dalam hal hal luar biasa

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi deskripsi atau uraian dari teori yang digunakan atau yang melandasi dari penulisan proposal hukum. Dalam hal ini menguraikan tentang tinjauan umum

BAB III PEMBAHASAN

Di dalam pembahasan penulis akan menguraikan hasil penelitian berupa analisa yang merupakan hasil penjabaran jawaban dari rumusan masalah dan dikaitkan dengan teori-teori yang melandasi.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup yang menjadi sub bab yakni kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan berisikan intisari pembahasan yang didapatkan dalam penulisan ini. Sedangkan saran berisikan rekomendasi dari penulis atas permasalahan yang diangkat.

